

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu hak asasi individu dan komponen dasar untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjamin terciptanya kesejahteraan bagi setiap warga negara. Terpenuhiya kebutuhan pangan tidak hanya dilihat dari kuantitas pangan yang cukup. Tetapi juga harus memperhatikan kualitas, keragaman, keamanan, dan pangan itu sendiri. Kondisi rawan pangan terjadi apabila kebutuhan pangan tidak dapat terpenuhi. Kondisi rawan pangan menjadi salah satu dari masalah pangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dijelaskan bahwa masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan setiap individu yang hidup di Indonesia. Selain itu, terwujudnya ketahanan pangan akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dari setiap indi

vidu yang tercerminda rtersedianyapangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pangan ialah Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan dari Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Melalui kebijakan Ketahanan Pangan, pemerintah menegaskan perlunya peran dari seluruh sektor baik pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan salah satu kebijakan pelaksana dari kebijakan Ketahanan Pangan. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya masalah pangan dengan cara memantau situasi pangan dan gizi. SKPG merupakan serangkaian proses meliputi pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi.

Berdasarkan data BPS tahun 2012, pada tahun 2011 masih terdapat 42,08 juta penduduk atau sekitar 17,41% dari seluruh penduduk di Indonesia mengalami kondisi sangat rawan pangan. Data BPS tahun 2013 menunjukkan persentase angka rawan pangan pada tahun 2012

mencapai sekitar 19,46% atau 47,64 juta penduduk dari seluruh penduduk di Indonesia mengalami kondisi sangat rawan pangan. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,56 juta penduduk. Berdasarkan data Global Food Security Index 2012, yang dirilis Economic Intelligent Unit, indeks keamanan pangan Indonesia berada di bawah 50 (0-100). Posisi Indonesia jauh lebih buruk dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina.

Kondisi rawan pangan disebabkan oleh banyak faktor. Rawan pangan kronis disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada waktu yang lama karena keterbatasan ekonomi. Rawan pangan transien disebabkan oleh faktor alam seperti kekeringan, banjir, hama, penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya. Rawan pangan transien bersifat mendadak dan sementara.

Pemantauan kondisi rawan pangan di tingkat desa sangat diperlukan untuk melihat tingkat kerawanan pangan di tingkat desa.

Sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan kerawanan pangan. Salah

satunya untuk memantau kondisi pangan di tingkat desa dapat dilakukan melalui SKPG.

SKPG dilaksanakan oleh kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat melalui pokja/tim SKPG yang dibentuk oleh pemerintah di masing-masing tingkatannya. Dari serangkaian proses dalam SKPG dihasilkan Peta Rawan Pangan

yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan berbagai intervensi. Intervensi tersebut berupa kebijakan ataupun program untuk mengatasi masalah krisis pangan atau untuk acuan pengelolaan pangan di zona lamjang kapanjang.

Peta Rawan Pangan dibuat dengan menganalisis tiga aspek, yakni: aspek ketersediaan pangan, aspek akses terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

Aspek ketersediaan pangan mengacu pada jumlah produksi pertanian yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan pangan baik secara bulanan maupun tahunan. Aspek akses pangan mengacu pada jumlah rumah tangga miskin. Aspek pemanfaatan pangan mengacu pada jumlah balita dengan gizi buruk di suatu wilayah. Untuk memvisualisasikan tingkat rawan pangan suatu wilayah digunakan tiga warna yakni: warna hijau untuk wilayah dengan kondisi aman pangan, warna kuning untuk kondisi waspada, dan warna merah untuk kondisi terindikasi rawan pangan. Keefektifan Peta Rawan Pangan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan suatu wilayah akan dipengaruhi oleh efektivitas dari pelaksanaan SKPG.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang rentan terhadap kejadian rawan pangan terutama rawan pangan transien. Hal ini karena Kabupaten Bantul merupakan kawasan rawan bencana mulai banjir, angin kencang dan tanah longsor (www.kr.co.id/bantul-siaga-darurat-bencana, diakses 24 Februari 2014 pukul 09.19 WIB). Peran SKPG sangat penting untuk

memberikan informasi bagi pemerintah Kabupaten Bantul terkait dengan kondisi pangan dan gizi, sehingga tindakan penanggulangan rawan pangan dapat tepat sasaran.

Berdasarkan Peta Rawan Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2012, dari 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul terdapat 10 desa dengan tingkat resiko rawan pangan dan gizi yang tinggi. Kesepuluh desa tersebut yakni Desa Banguntapan, Desa Singosaren, Desa Jagalan, Desa Bangunjiwo, Desa Tirtonirmolo, Desa Tamantirto, Desa Ngestiharjo, Desa Guwosari, Desa Argosari, dan Desa Srihardono. Terjadinya kerawanan pangan dan gizi umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya jumlah hasil produksi pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di wilayah tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Harsonodkk (2013), ditemukan bahwa terdapat desa dengan kondisi tidak rawan pangan akan tetapi memperoleh bantuan dana untuk ketahanan pangan dalam Program Desa Mandiri Pangan. Desa tersebut yakni Desa Bawuran Kecamatan Pleret. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, seberapa berpengaruh SKPG terhadap penentuan lokasi program-program pemberdayaan desa-desa yang rawan pangan.

SKPG dilaksanakan sebagai langkah antisipasi dan penanggulangan kerawanan pangan di Kabupaten Bantul. SKPG harusnya mampu menjadi pedoman agar pemerataan dan peningkatan ketahanan pangan dapat dilakukan. Berdasarkan paparan permasalahan tersebut,

peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana efektivitas pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul dalam menyediakan informasi kondisi rawan pangan dan gizi. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masih tingginya persentase rawan pangan di Indonesia. Ini menunjukkan terdapat beberapa rakyat Indonesia dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.
2. Pentingnya SKPG untuk menyediakan informasi kondisi rawan pangan dan gizi, untuk mengantisipasi rawan pangan.
3. Kabupaten Bantul rentan terhadap kejadian rawan pangan transien, sehingga informasi rawan pangan dan gizi sangat diperlukan untuk tindakan pencegahan.
4. Terdapat 10 desa yang terindikasi rawan pangan di Kabupaten Bantul pada tahun 2012.
5. Adanya desa di Kecamatan Pleret yang tidak mengalami rawan pangan memperoleh program-program ketahanan pangan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pertimbangan luasnya cakupan masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti, diperlukan pembatasan agar peneliti dapat terfokus. Peneliti menfokuskan penelitian pada efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni bagaimana efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah mengenai efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi jurusan/fakultas/universitas untuk melakukan penelitian lanjutan berkenaan dengan kebijakan publik atau Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Negara.

2. Secara Praktik

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus sebagai bentuk pengaplikasian berbagai macam ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Melihat berbagai permasalahan sosial khususnya dalam hal pencegahan rawan pangan dengan berbagai macam ilmu administrasi negara dan mendalaminya dengan metodologi penelitian yang ada.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta khususnya yang berkaitan dengan topik kebijakan publik atau ketahanan pangan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Kabupaten Bantul. Sehingga masyarakat dapat berperan serta baik pasif maupun aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.